

Tinjauan Mata Kuliah

Buku Materi Pokok (BMP) Hukum Administrasi Negara dan Pemerintahan Daerah akan menjadi bahan pengajaran dasar (*basic leervak*) sekaligus menjadi kerangka acuan untuk mahasiswa dalam mempelajari ilmu hukum khususnya substansi hukum administrasi negara dan juga pemerintahan daerah. Modul ini akan membahas secara komprehensif mengenai hukum administrasi negara dan pemerintahan daerah, tidak hanya pada tataran normatif, tetapi lebih jauh menyelami mengenai konsep-konsep, latar belakang historis, politik hukum, hingga teori-teori yang menjelaskan mengenai hukum administrasi negara dan pemerintahan daerah. Pemahaman terhadap hal-hal tersebut sangatlah penting untuk membangun perspektif keilmuan yang komprehensif, khususnya untuk para birokrat, pegawai pemerintahan, akademisi dan mahasiswa sehingga tidak hanya mengetahui sistem hukum administrasi negara dari kulitnya saja, melainkan juga pada aspek teoritis. Oleh karena itu, sebelum memperdalam ilmu hukum administrasi negara, mahasiswa perlu terlebih dahulu untuk mengetahui dan memahami mengenai topik-topik kajian hukum administrasi negara dan pemerintahan daerah secara terinci yang akan dibahas dalam Modul 1 hingga Modul 12.

Relevansi

Mata kuliah Hukum Administrasi Negara dan Pemerintahan Daerah merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh pada Semester 2 oleh mahasiswa pada BKU Kenegaraan. Untuk dapat menempuh mata kuliah ini mahasiswa wajib lulus mata kuliah dasar yang berkaitan dengan mata kuliah hukum administrasi negara pada mata kuliah ini. Dalam memahami substansi dari mata kuliah ini mahasiswa juga harus dapat memahami mata kuliah lainnya seperti hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum perdata dikarenakan mata kuliah ini tidak dapat terlepas dari pemahaman ilmu-ilmu lainnya.

Manfaat

Mata kuliah Hukum Administrasi dan Pemerintahan Desa mempelajari tentang bagaimana pemerintahan dikelola dan diselenggarakan dengan baik. Mata kuliah ini sangat berguna dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara oleh administrasi negara. Selain itu dengan mempelajari Hukum Pemerintahan Daerah dapat menganalisis gejala otonomi daerah dan *pemerintahan daerah* secara komprehensif dengan mengakomodasi isu-isu kekinian.

Cara Mempelajari Isi Materi Buku Ajar

Untuk mempermudah mempelajari substansi materi kuliah ini, kepada mahasiswa diperlukan keaktifan untuk menyimak gambar-gambar yang telah diberikan dan mengerjakan latihan-latihan yang diberikan sesuai dengan arahan. Selain itu, mahasiswa

dapat memanfaatkan isi Modul 1-12 dengan mempelajari latihan soal serta tes formatif yang telah diberikan.

Uraian Singkat Isi Mata Ajar/Buku Ajar (*Outline*)

Buku Hukum Administrasi dan Pemerintahan Daerah ini terdiri dari 12 modul, yaitu:

Modul 1: Perkembangan Konsep, Sejarah Hukum, dan Politik Hukum Administrasi Negara dan Pemerintahan Daerah

Modul ini akan membahas mengenai Sejarah dan Perkembangan Hukum Administrasi Negara, Perkembangan Politik Hukum Administrasi Negara, serta mengenai Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah.

Modul 2: Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara dan Pemerintahan Daerah

Modul ini akan membahas mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara dan sumber-sumber hukum pemerintahan daerah.

Modul 3: Kewenangan Pemerintah, Tindakan Pemerintahan, dan Paksaan Pemerintah yang Bersumber dari Delegasi, Mandat, dan Tugas Pembantuan, Dalam Kerangka Desentralisasi dan Dekonsentrasi

Modul ini akan membahas mengenai konsep-konsep kewenangan pemerintah dan tindakan pemerintahan dalam kerangka desentralisasi dan dekonsentrasi.

Modul 4: Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Modul ini akan membahas mengenai perkembangan konsep *good governance* dan mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia beserta pengaturannya.

Modul 5: Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan

Modul ini akan membahas mengenai konsep otonomi daerah beserta pengaturannya dalam konstitusi Indonesia, dan dinamika serta realitas otonomi daerah di Indonesia dalam konteks negara kesatuan.

Modul 6: Tantangan Menuju Reformasi Birokrasi

Modul ini akan membahas mengenai tantangan menuju reformasi birokrasi.

Modul 7: Tanggung Jawab Pemerintah dan Sanksi Terhadap Malaadministratif

Modul ini akan membahas mengenai tanggung jawab pemerintah dan sanksi terhadap malaadministratif.

Modul 8: Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Modul ini akan membahas mengenai keuangan daerah, dan penguatan serta harmonisasi hubungan keuangan antara pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah di negara kesatuan Indonesia.

Modul 9: Otonomi Desa dan Pemerintahan Desa

Modul ini akan membahas mengenai otonomi desa, dinamika pemerintahan desa.

Modul 10: Produk Hukum Desa dan Problematika Demokratisasi di Desa

Modul ini akan membahas mengenai produk hukum desa, dan problematika demokratisasi di desa.

Modul 11: Keputusan Tata Usaha Negara dan Diskresi

Modul ini akan membahas mengenai definisi dan ruang lingkup keputusan tata usaha negara, jenis-jenis keputusan tata usaha negara, dan diskresi pemerintah.

Modul 12: Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Berbagai Problematika Hukum

Sebagai modul terakhir, modul ini akan membahas mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif PTUN, upaya hukum dalam sistem peradilan TUN, dan *benchmark cases* PTUN di Indonesia serta problematikanya

Demikian kerangka modul ini untuk dipelajari dan dipahami, semoga kiranya dapat menjadi bahan acuan pembelajaran dan dikembangkan dalam pembelajaran serta diskusi keilmiah.

Semangat dan Selamat Belajar!

Peta Kompetensi Hukum Administrasi dan Pemerintahan Daerah/MKUM5210/4 SKS

